

Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun ini KID mengukur perkembangan demokrasi dengan menggunakan metode Asian Democracy Index (ADI/Indeks Demokrasi Asia) yang juga digunakan oleh Perkumpulan Demos dan Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI) untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat nasional dan provinsi. Metode penilaian demokrasi ini telah dilakukan selama tiga tahun oleh kedua lembaga tersebut bersama lembaga-lembaga lain di belahan Asia lain yaitu Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Thailand dan India. Selama itu pula metode dan koleksi data disempurnakan. Dari pengalaman tiga tahun tersebut tim peneliti percaya bahwa nilai (indeks) yang dibentuk melalui tiga penelitian tersebut cukup konsisten dan akurat menjawab fakta-fakta demokrasi di ranah politik, ekonomi dan masyarakat sipil.

KID beranggapan bahwa dengan mengadopsi metode ADI untuk mengukur perkembangan demokrasi akan tergambar benang merah perkembangan demokrasi dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/ kota. Disamping itu, berbeda dengan metode pengukuran sebelumnya, yang khusus menyoroti kinerja lembaga-lembaga penopang demokrasi, metode ADI dianggap dapat memberikan informasi yang lebih substansial atas problematika penerapan demokrasi. Dengan demikian hasil indeks ini diharapkan tidak sekedar menjadi laporan penelitian belaka melainkan memberikan informasi yang dapat langsung ditindak lanjuti – terutama oleh Komite Komunitas di kabupaten/ kota.

Selain dalam hal metode, perbedaan dengan pengukuran sebelumnya juga terdapat pada wilayah pengukuran. Jika pada pengukuran sebelumnya yang dilakukan oleh KID wilayah pengukuran meliputi Jayapura, Batu, Tangerang Selatan dan Kabupaten Aceh Utara. Dalam penelitian kali ini Jayapura diganti dengan Pangkep. Sementara Batu, Tangerang Selatan dan Kabupaten Aceh Utara tetap dipertahankan. Penggantian wilayah Jayapura dengan Pangkep semata untuk mencapai tujuan di atas yaitu memberikan gambaran perkembangan demokrasi Indonesia dari nasional hingga kabupaten/kota.

Lebih dari itu pengukuran demokrasi di tingkat kabupaten memiliki pertimbangan strategis lain. Pertama seperti locus kegiatan KID lain melalui Sekolah Demokrasi berfokus di tingkat kabupaten, kabupaten kami anggap strategis untuk menyemai demokrasi secara nyata. Sinergi dengan kegiatan KID tersebut pengukuran ini diharap mampu memberi gambaran mengenai problem-problem utama demokrasi di wilayah-wilayah tersebut dan menjadikannya modal untuk menggagas, merumuskan dan menggerakkan agenda demokrasi lebih lanjut di daerah-daerah ini, terutama bagi alumni Sekolah Demokrasi setempat. Kedua, sebagai sebuah proses, sangat mungkin demokrasi berjalan stagnan atau bahkan mundur kembali ke otoritarianisme. Banyak studi menggambarkan hal tersebut. Akhir-akhir ini ancaman itu semakin besar dengan ketiadaan kepemimpinan elit politik, apatisme warga negara terhadap berbagai lembaga

demokrasi, munculnya kembali tokoh-tokoh pelaku kekerasan dalam percaturan politik serta merasuknya konsumerisme dalam kehidupan publik. Maka, pengukuran diperlukan untuk mengetahui kondisi perkembangan (atau kemunduran) proses demokratisasi. Ketiga, walaupun demokrasi dapat diartikan sebagai kebebasan untuk berpolitik, hal ini seringkali disalahgunakan oleh segelintir elit di daerah yang memiliki akses khusus terhadap sumber-sumber daya politik dan ekonomi, sehingga muncul monopoli dalam bentuk dinasti atau oligarki di daerah. Terakhir, terlepas dari perdebatan konseptual tentang hubungan demokrasi dan kesejahteraan, hal yang ingin dijawab lewat pengukuran perkembangan demokrasi ini adalah, sejauh mana demokrasi dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Bagi KID dan Perkumpulan Demos hal ini sangat instrumental. Demokrasi haruslah menghasilkan pemerataan kesejahteraan, karena pemerataan kesejahteraan inilah yang membedakan demokrasi dari otoritarianisme.

Selengkapnya mengenai metodologi dan hasil temuan pengukuran indeks demokrasi, dapat dilihat di link [berikut](#)